

KATA PENGANTAR

**Erni Ariyanti Sitorus, S.H., M.Kn.**  
(Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara)



*Dinamika*  
**PARTAI**  
**GOLKAR**  
**SUMATERA UTARA**

*Tantangan dan Masa Depan*

**Dr. Suheri Harahap, M.Si.**

**Editor: Dr. Abdul Rasyid, M.A.**

**DINAMIKA PARTAI GOLKAR SUMATERA UTARA**  
**Tantangan dan Masa Depan**

**Edisi Pertama**  
Copyright © 2026

ISBN 978-634-7272-18-8  
15,5 x 23 cm  
xxviii, 214 hlm  
Cetakan ke-1, April 2026

**Litera. 2026.0052**

**Penulis**

Dr. Suheri Harahap, M.Si.

**Editor**

Dr. Abdul Rasyid, M.A.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Rendy & Iam

**Penerbit**

LITERA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

## KATA PENGANTAR

*Dr. Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si*

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Dinamika Partai Golkar Sumatera Utara, Tantangan dan Masa Depan* dapat disusun dan diterbitkan. Kehadiran buku ini merupakan ikhtiar intelektual yang penting dalam mendokumentasikan, merefleksikan, sekaligus menganalisis dinamika politik dan organisasi Partai Golkar di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Partai Golkar sebagai partai politik yang lahir dari semangat kebangsaan, pembangunan, dan stabilitas nasional, senantiasa menempatkan penguatan struktur organisasi daerah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. Dalam konteks itulah, Sumatera Utara memiliki posisi strategis, baik secara geopolitik, ekonomi, maupun sosiokultural. Dinamika politik di Sumatera Utara tidak hanya mencerminkan kontestasi kekuasaan, tetapi juga proses konsolidasi demokrasi, kaderisasi kepemimpinan, serta upaya membangun tata kelola politik yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Buku ini secara komprehensif mengulas bagaimana nilai harmonisasi, solidaritas, dan kolaborasi menjadi pilar penting dalam perjalanan Partai Golkar Sumatera Utara. Harmonisasi dipahami sebagai upaya menyatukan perbedaan pandangan dan kepentingan dalam bingkai tujuan bersama. Solidaritas mencerminkan kekuatan kolektif kader dan struktur partai dalam menghadapi berbagai tantangan politik. Sementara kolaborasi menjadi strategi penting dalam membangun sinergi antara partai, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat demi terwujudnya Sumatera Utara yang berdaya saing dan berkeadilan. Saya memandang buku ini dapat melengkapi khasazah dan wawasan pengurus partai politik khususnya kader Golkar sehingga dapat menambah wawasan tidak hanya sebagai catatan sejarah politik daerah, tetapi juga sebagai referensi akademik dan praktis bagi kader Partai Golkar, pengamat politik, mahasiswa, serta masyarakat luas yang ingin memahami dinamika partai politik dalam konteks demokrasi Indonesia. Pendekatan analitis yang digunakan penulis memberikan gambaran objektif tentang proses internal partai, relasi kekuasaan, serta tantangan dan peluang Partai Golkar di Sumatera Utara dalam menjawab tuntutan zaman. Ke depan, Partai Golkar dituntut untuk terus melakukan pembaruan, memperkuat institusionalisasi partai, serta menghadirkan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi rakyat. Semangat *Sumut Berkah* sebagaimana diangkat dalam buku ini sejalan dengan komitmen Partai Golkar untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan di seluruh wilayah Indonesia.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada para penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadirannya memberikan manfaat, memperkaya khazanah pemikiran politik nasional, serta menjadi inspirasi bagi penguatan peran Partai Golkar dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Jakarta, Januari 2026

Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar

**Dr. Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si**

## SAMBUTAN

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T  
Plt. Partai Golkar Sumatera Utara  
Anggota DPR RI Fraksi Golkar

Konsep harmonisasi Partai Golkar adalah tentang bagaimana partai dapat mencapai kesepakatan dan kerjasama antara kader, simpatisan, dan pengurus partai untuk mencapai tujuan bersama, seperti memenangkan pemilu. Bagi partai Golkar khususnya di Sumatera Utara sangat penting untuk: Pertama, Kesatuan dan Kesepakatan. Partai Golkar harus memiliki kesatuan dan kesepakatan dalam visi, misi, dan tujuan untuk mencapai kemenangan. Kedua, Komunikasi Efektif, Komunikasi efektif antara kader, simpatisan, dan pengurus partai adalah kunci untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama. Ketiga, kerjasama dan kolaborasi antara kader, simpatisan, dan pengurus partai adalah penting untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, Pengembangan kader yang berkualitas dan berintegritas adalah penting untuk mencapai kemenangan. Kelima, pelayanan publik yang baik dan responsif adalah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. Keenam, manajemen konflik yang efektif adalah penting untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi dalam partai.

Dalam konteks Partai Golkar Sumatera Utara, konsep harmonisasi dapat diimplementasikan melalui Rapat koordinasi antara pengurus partai, kader, dan simpatisan untuk membahas strategi dan tujuan partai. Pelatihan kader untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kader dalam bidang politik dan manajemen. Pelayanan publik yang baik dan responsif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. Komunikasi efektif antara kader, simpatisan, dan pengurus partai untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama.

Dengan demikian, Partai Golkar Sumatera Utara dapat mencapai kesepakatan dan kerjasama yang kuat untuk mencapai kemenangan dalam pemilu. Karena itu buku sangat penting untuk terus menerus menjaga partai agar tetap mematuhi aturan partai dan menjaga harmonisasi dan soliditas internal juga komitmen kepada pemerintahan Prabowo-Gibran di tingkat nasional dan Bobby-Surya di tingkat propinsi Sumatera Utara. Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara tugas adalah mempersiapkan Musyawarah Daerah. Selain Musda, konsolidasi internal menjadi agenda utama. Saya bertekad merangkul seluruh kader Golkar Sumut agar bersatu dan solid menghadapi agenda politik lima tahun ke depan. Akan mengonsolidasikan semua kekuatan kader. Tantangannya tentu tidak mudah, tetapi harus dihadapi bersama.

Saya memberi apresiasi atas penulisan karya akademik tentang Golkar Sumut kedepan ada lahir tesis disertasi dan saya kita buku tentang Golkar di Sumut belum banyak kedepan lahir karya-karya hasil yang mengungkap dinamika partai, kontribusi ini sangat kami hargai dan Golkar Sumut konsisten tetap menjadi pemenang Pemilu tahun 2029 dan mampu memberikan yang terbaik untuk rakyat Sumatera Utara. Wassalam.

Medan, 15 Januari 2026  
Plt. Partai Golkar Sumatera Utara

**Ahmad Doli Kurnia Tandjung**

## SAMBUTAN

Prof. Dr. Anang Anas Azhar, MA  
Guru Besar Komunikasi Politik Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan

Sejak reformasi bergulir tahun 1998, jumlah Partai Politik (Parpol) di Indonesia mengalami lonjakan drastis. Tiga Parpol dalam produk politik Rezim Soeharto, tetap ikut berkompetisi pada Pemilu. Mulai Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 sampai Pemilu 2024. Dua partai yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan menjadi partai the best, aman secara elektoral mengalokasikan kursinya di parlemen. Terkecuali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami down electoral yang akhirnya gagal menempatkan kader-kader terbaiknya di kursi parlemen. Lantas pernyataan yang mengemuka adalah mengapa Partai Golkar mampu survive di tengah badai? Ada tiga hal yang menurut saya mengapa Partai Golkar survive dan mampu mempertahankan elektoralnya di parlemen. Pertama, Partai Golkar mampu menjaga ketokohan figur politik, (Azhar., 2017).

Popularitas tokoh senior partai ini tidak dilupakan begitu saja. Sebut saja, Akbar Tandjung, HM Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakrie dan HR Agung Laksono, dan masih banyak lagi tokoh senior lainnya tetap aktif dalam aktivitas politik Partai Golkar. Posisi politik seperti inilah yang menjadi tradisi Partai Golkar survive menjaga hasil pemilu ke pemilu. Meski dalam perjalanannya partai ini banyak turbulensi politik, berbeda pandangan sesama pengurus, namun tidak mengurangi suara pemilu secara elektoral. Kedua, Pencitraan Politik Partai Golkar. Saat ini kita berada pada era citra dan pencitraan. Kita tidak terlepas dari genggaman digitalisasi untuk mencitrakan sosok dari partai. Semua kegiatan politik yang dilakukan politisi dan Parpol harus nampak di ruang digital. Sekarang, media sudah menjadi bagian dari aktor politik, (Azhar:2017). Media bertujuan untuk memperkenalkan sosok politisi dan program partai politik yang menyentuh konsituen. Nah, di sinilah kelebihan Partai Golkar sebagai lama yang berkontestasi di panggung poliitk Indonesia.

Partai ini melalui sosok/figurnya sukses mencitrakan diri di hadapan publik. Figur partai berlambang beringin ini, politisinya banyak menjabat kepala daerah, apakah sebagai gubernur, bupati dan walikota. Kaderkader Partai Golkar yang duduk inilah, menjadi “senjata” paling ampuh untuk mencitrakan Partai Golkar di hadapan rakyat. Artinya, antara pencitraan figur dan pencitraan Partai Golkar, tidak dapat kita lepaskan dari kepentingan elektoral. Singkatnya Partai Golkar adalah partai yang sukses mencitrakan diri sebagai partai yang mampu bertahan secara SDM dan finansial. Ketiga, Partai Golkar masuk kategori partai veto player. Saya menilai hampir, bahkan semua partai politik masuk dalam penganut mazhab veto player. Keputusan politik tertinggi berada di tangan ketua umum partai. Pengurus lain di partai politik bertindak sebagai follower atas keputusan politik ketua umum.

Merujuk sejarah di masa Nabi Muhammad SAW, di masa beliau tidak ada sebutan partai politik, apalagi partai politik modern seperti sekarang ini. Tetapi, di masa itu ada kelompok-kelompok berbasis ideologi yang memiliki kepentingan (Muhajirin dan Ansor) dan kaum Quraiys. Kelompok Muhajirin dan Ansor dikenal sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, sedangkan kaum Quraiys disebut kelompok penentang. Bahkkan ada satu sebutan lagi yang dikenal sebagai aliansi strategis/koalisi yang mengakomodir kepentingan banyak kelompok. Akhirnya, dideklarasikan-lah Piagam Madinah, sebagai kesepakatan multi kepentingan antara umat Islam

pengikut nabi dengan pengikut di luar Islam. Yang ingin saya katakan, bahwa politik veto player sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Keputusan politik tertinggi di masa itu, berada di tangan nabi sebagai pemegang leadership politik Islam di masa itu.

Partai Golkar menurut saya, sukses mengikuti jejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam mengambil keputusan strategis di internal partai. Partai ini memberi kesempatan full kepada ketua umum untuk berfatwa politik menentukan arah kebijakan politik Partai Golkar, apakah dalam koalisi pemilu, koalisi parpol pada kompetisi presiden, gubernur, bupati dan walikota. Di sinilah letak kekuatan Partai Golkar sebagai penganut mazhab veto player. Buku yang berada di tangan Anda berjudul : “Hamonisasi, Soliditas dan Kolaborasi Sumut Berkah”: Kajian Dinamika Partai Golkar Sumatera Utara, karya Dr Suheri Harahap M,Si, ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna. Enak dibaca dan menjadi buku referensi, apakah kepada akademisi di perguruan tinggi, kalangan politisi dan masyarakat umum. Di usianya yang tidak begitu muda lagi, Suheri Harahap tetap fokus memikirkan perkembangan komunikasi politik Indonesia dan persoalan keummatan dalam tradisi intelektual ranah akademik. Tidak terkecuali menuangkannya dalam gagasan dan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini.

Isi buku ini ditulis dalam jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus, ketepatan studi kasusnya berada di Partai Golkar. Buku ini juga menjadi bagian pencitraan partai sebagai partai modern yang melibatkan kalangan akademisi. Saya berharap kehadiran buku ini, dapat dimanfaatkan secara aktif bagi kalangan akademisi, politisi dan masyarakat umum. Kehadiran buku ini juga mempertegas peran komunikasi politik Partai Golkar di belantika politik Indonesia. Sebagai pemenang Pemilu, bahkan mengalami banyak turbulensi politik bertubi-tubi, partai ini sukses mengelola konflik internalnya secara apik, dan tetap bersinar sebagai Parpol yang disenangi rakyat dan dipilih rakyat dengan hati ikhlas.

Medan, Januari 2026

Prof. Dr. Anang Anas Azhar, MA  
Guru Besar UINSU

## SAMBUTAN

Prof. Dr. Badaruddin. M.Si  
Guru Besar Ilmu Politik USU

Teori politik Bourdieu, berbagai modal (ekonomi, sosial, budaya, simbolik, politik) adalah sumber daya yang saling berkaitan dan dapat dikonversi untuk mendapatkan kekuasaan dalam arena politik, di mana modal ekonomi (uang), sosial (jaringan), budaya (pendidikan, selera), dan simbolik (prestise) digunakan untuk memanipulasi dan melegitimasi posisi, sementara modal politik adalah akumulasi pengaruh dan jabatan formal yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh kemenangan elektoral dan kekuasaan. Jenis-jenis Modal dalam Kajian Politik Bourdieu. Modal Ekonomi (Economic Capital): Sumber daya material langsung seperti uang, aset, dan kekayaan yang dapat dikonversi menjadi uang dan digunakan untuk kampanye, membayar donatur, atau membeli dukungan politik.

Modal Sosial (Social Capital): Jaringan relasi dan koneksi sosial yang dimiliki individu (keluarga, teman, kelompok) yang memberikan dukungan dan kepercayaan, penting untuk membangun basis massa dan tim sukses. Modal Budaya (Cultural Capital): Pengetahuan, keterampilan, latar belakang pendidikan (gelar prestise), selera, dan cara berbicara yang diakui secara sosial, yang bisa meningkatkan status dan kredibilitas kandidat. Modal Simbolik (Symbolic Capital): Bentuk modal yang sudah dilegitimasi (seperti reputasi, kehormatan, prestise) yang berasal dari bentuk modal lain (misalnya, gelar kebangsawanan atau haji/hajah), memberikan kekuasaan simbolik untuk mempengaruhi persepsi publik.

Modal Politik (Political Capital): Jabatan politik formal (misalnya anggota dewan), dukungan dari partai politik, koalisi partai, serta peran tim sukses, yang merupakan aset penting dalam kontestasi elektoral. Hubungan Antar Modal dalam Politik. Interkonversi: Satu bentuk modal dapat diubah menjadi bentuk modal lain. Contohnya, modal ekonomi bisa dibelikan modal sosial (donasi), modal budaya (pendidikan tinggi) bisa meningkatkan status simbolik, dan modal politik (jabatan) bisa memperkuat modal sosial. Legitimasi Kekuasaan: Modal budaya dan sosial sering digunakan untuk menutupi dan melegitimasi dominasi modal ekonomi, membuat kekuasaan tampak alami atau berdasarkan prestasi, bukan hanya kekayaan. Arena Politik: Dalam "arena" atau medan politik, berbagai modal ini dipertaruhkan dan diakumulasi. Siapa pun yang memiliki kombinasi modal tertinggi (sesuai dengan logika arena tersebut) akan memiliki posisi kekuasaan yang lebih kuat, seperti yang terlihat dalam pemilihan umum (Pilkada).

Arena politik sebagai pengabdian adalah konsep yang menekankan bahwa politik bukanlah hanya tentang kekuasaan atau kepentingan pribadi, tetapi tentang pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Untuk itu mestinya Golkar percaya bahwa politik harus dijalankan dengan niat yang tulus untuk melayani dan memajukan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, politik menjadi sebuah panggilan untuk berbuat baik dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Artinya Golkar Sumatera Utara khususnya berkomitmen untuk menjalankan politik sebagai pengabdian, dengan fokus pada pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ditengah ancaman politik identitas, kehadiran Golkar menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan politik yang berkeadilan dan bermartabat. Oleh karena itu, Golkar diharapkan berkomitmen untuk menjalankan politik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu politik yang inklusif, moderat, dan berpandangan luas. Perlu penguatan Politik Pancasila Golkar yaitu komitmen Partai Golkar untuk menjalankan politik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia. Dalam meraih simpati masyarakat, Partai Golkar masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Diperlukan peran dan strategi yang kuat dalam membangun mesin politik yang efektif untuk menyambut Pemilu 2029. Selain itu, partai ini juga perlu mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan citra dan transparansi serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapatkan dukungan yang lebih besar khususnya di Sumatera Utara, Sumut yang dilanda bencana tahun 2025 sampai tahun 2026 akan diperlukan rekonstruksi yang berkelanjutan, kiranya Golkar Peduli Bencana terus memberi bantuan bagi masyarakat. Buku ini memberi manfaat bagi Golkar membangun harmonisasi dan soliditas tetap berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Medan, 16 Januari 2026

Prof. Dr. Badaruddin  
Guru Besar Ilmu Politik USU

## EPILOG

Membaca Dinamika Partai Politik Daerah dalam Kerangka Demokrasi  
Oleh Dr. Abdul Rasyid, MA

Buku *Dinamika Partai Golkar Sumatera Utara, Tantangan dan Masa Depan* disusun sebagai kontribusi akademik dalam memahami dinamika partai politik di tingkat daerah, khususnya dalam konteks demokrasi Indonesia yang semakin terdesentralisasi. Fokus kajian pada Partai Golkar Sumatera Utara tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian normatif, melainkan untuk menghadirkan pembacaan analitis terhadap praktik organisasi, pola komunikasi politik, serta relasi internal dan eksternal partai dalam ruang politik lokal.

Kajian dalam buku ini memperlihatkan bahwa partai politik daerah menghadapi tantangan yang bersifat struktural sekaligus kultural. Di satu sisi, partai dituntut untuk menjaga konsistensi ideologi dan tata kelola organisasi; di sisi lain, partai harus beradaptasi dengan dinamika sosial, perubahan preferensi pemilih, serta perkembangan teknologi komunikasi politik. Solidaritas internal dan kolaborasi eksternal muncul sebagai dua variabel penting yang memengaruhi stabilitas organisasi partai dan efektivitas perannya dalam sistem demokrasi lokal.

Dalam perspektif akademik, konsep harmonisasi yang digunakan dalam buku ini dapat dibaca sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana mekanisme komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dijalankan dalam organisasi politik yang plural dan dinamis. Harmoni tidak dipahami sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai proses pengelolaan perbedaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, konflik internal dan kompetisi politik diposisikan sebagai bagian inheren dari kehidupan partai, yang dapat bersifat produktif apabila dikelola secara institusional dan komunikatif.

Buku ini juga menempatkan kolaborasi sebagai fenomena politik yang melampaui kepentingan elektoral jangka pendek. Kolaborasi dipahami sebagai relasi fungsional antara partai politik dengan aktor-aktor lain dalam sistem politik dan sosial, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap peran partai politik sebagai institusi demokrasi, bukan semata sebagai kendaraan kekuasaan. Sebagai editor, kami menilai buku ini relevan bagi pengembangan kajian komunikasi politik, ilmu politik lokal, serta studi partai politik di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam memahami kompleksitas politik daerah, sekaligus membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan partai politik dalam kerangka demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan final atas dinamika Partai Golkar Sumatera Utara, melainkan sebagai bagian dari diskursus ilmiah yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang analitis dan terbuka, buku ini diharapkan dapat mendorong penelitian lanjutan dan refleksi kritis mengenai masa depan partai politik daerah dalam menghadapi tantangan demokrasi Indonesia ke depan.

## SEKAPUR SIRIH

Penulis: Dr. Suheri Harahap, M,Si  
Dosen UINSU Medan

Harmonisasi partai politik adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan kemajuan politik di Indonesia. Dengan harmonisasi, partai politik dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi. Golkar sebagai salah satu partai politik di Indonesia, berkomitmen untuk terus menjalankan politik yang harmonis, inklusif, dan berpandangan luas. Kami percaya bahwa dengan harmonisasi, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semua. Partai Golkar Sumatera Utara perlu melanjutkan perjuangan ini bersama-sama, dengan semangat harmonisasi dan kebersamaan, untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Soliditas Partai Golkar adalah kunci untuk mencapai tujuan dan cita-cita partai. Dengan soliditas, kita dapat menghadapi tantangan dan mengatasi perbedaan, serta meningkatkan kekuatan dan pengaruh partai.

Golkar telah membuktikan diri sebagai partai yang solid dan kuat, dengan kader-kader yang berdedikasi dan berintegritas. Kami akan terus menjaga soliditas dan kesatuan partai, serta meningkatkan kinerja dan prestasi partai. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sumatera Utara. Sumut Berkah adalah contoh nyata bahwa dengan kerja sama dan kolaborasi, kita dapat mencapai tujuan bersama dan membangun daerah yang lebih baik. Kolaborasi ini, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, untuk mencapai Sumatera Utara yang lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih berkah.

Terakhir dari dinamika Partai Golkar belum terlihat indikasi perpecahan walaupun ada riak-riak sebagai protes atas pencopotan Ketua DPD II Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah dan kehadiran Plt. Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung terus melakukan konsolidasi dan mendorong harmonisasi dan soliditas kepada kader partai se Sumatera Utara menjelang Musyawarah Daerah Musda) di perkirakan bulan Januari 2026.

Medan, 16 Januari 2026  
Ketua Tim Penulis,

Anggota Tim Penulis

Dr. Suheri Harahap, M.Si.  
Dosen UIN Sumatera Utara

Haposan Hutahaeon, SE., MM  
Dosen UTND/APP-APIPSU Medan

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN Plt Golkar Sumut .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR Prof. Anang Azhar Anas.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA SAMBUTAN Prof. Dr. Badaruddin, M.Si .....</b>	<b>v</b>
<b>EPILOG Dr. Abdul Rasyid, MA .....</b>	<b>vii</b>
<b>SEKAPUR SIRIH PENULIS DAN TIM PENULIS.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II HARMONISASI DAN RIAK-RIAK DALAM PARTAI POLITIK.....</b>	<b>1</b>
2.1 Harmonisasi Partai Politik .....	6
2.2 Perpecahan Elite .....	7
2.3 Partai Politik .....	9
2.4 Golkar dan Sejarah Panjang Kekuasaan .....	11
2.4 Konflik Intra Partai .....	15
<b>BAB III MERAJUK SOLIDITAS DAN KEBERSAMAAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Soliditas Elite Partai Politik .....	19
3.2 Memelihara Soliditas Elite .....	21
3.3. Perpecahan Elite Partai Golkar di Beberapa Kabupaten .....	23
3.4 Sistem Kaderisasi yang Baik untuk Menjaga Soliditas .....	32
<b>BAB IV KOLABORASI PROGRAM KERJA MENCAPAI TUJUAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Strategi Kolaborasi Pengurus partai .....	34
4.2 Dinamika Kolaborasi Tim Dan Efisiensi Kerja .....	37
4.3 Elite Politik dan Kue Kekuasaan .....	48
4.4 Pencitraan Politik Melalui Kampanye Politik .....	44
4.5 Komunikasi Kelompok dalam Partai Politik .....	50
<b>BAB V MENGELOLA KONFLIK MEMENANGKAN PERTARUNGAN.....</b>	<b>55</b>
5.1 Konflik Antar Elite Politik Lokal .....	55
5.2 Tahapan-Tahapan Konflik .....	56
5.3 Penyebab Konflik .....	57
5.4 De-Eskalasi Konflik .....	59
5.5 Sumatera Utara dalam Peta Politik Nasional.....	61
<b>BAB VI SUMUT BERKAH UNTUK MASYARAKAT SUMATERA UTARA.....</b>	<b>64</b>
6.1 Visi Sumut Berkah Calon Gubernur yang Diusung Golkar di Sumut .....	64
6.2 Koalisi Partai Politik dalam Memenangkan Calon yang Diusung .....	65
6.3 Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar di Sumut .....	68

6.4 Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber <i>Golkar</i> ) .....	73
6.5 Ragam Kegiatan DPD Partai Golkar .....	91
<b>BAB VII KEMENANGAN GOLKAR KEMENANGAN RAKYAT .....</b>	<b>97</b>
7.1 Strategi Politik Partai Golkar Di Sumatera Utara .....	97
7.2 Kemenangan Partai Golkar Berdasarkan Data KPU .....	101
7.3 Konsolidasi Partai dan Tim sukses .....	110
7.4 Strategi <i>Segmentasi, Targetting, Positioning</i> .....	112
7.5 Peta Kekuatan Elite, Basis Elektoral, dan Arah Koalisi Partai Golkar Sumatera Utara .....	118
7.6 Pendapat Kader Tentang Golkar Sumut .....	121
<b>BAB VIII PEMILU 2029 PERTARUHAN BESAR PARTAI POLITIHK.....</b>	<b>127</b>
8.1 Politik yang Terus Berubah.....	127
8.2 Pemilih yang Semakin Kritis dan Rasional .....	129
8.3 Persaingan Partai yang Kian Ketat .....	131
8.4 Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal .....	133
8.5 Dampak terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi .....	134
8.6 Implikasi terhadap Koalisi dan Stabilitas Pemerintahan .....	136
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kekuatan dan Pengaruh Partai Golkar di Provinsi Sumatera Utara.....	13
Tabel 2.2	Kekuasaan dan Pengaruh Partai Golkar di Tingkat Nasional .....	14
Tabel 3.1	Ketua DPD Golkar Sumut Periode dari masa ke masa .....	28
Tabel 7.1	Persentase Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 .....	103
Tabel 8.1	Tingkat Keinginan Perubahan Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia.....	127
Table 8.2	Faktor Penilaian Pemilih Indonesia dalam Memilih Calon .....	129

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Golkar Sumut Gelar Rapat Pleno Bahas Jadwal Musda .....	19
Gambar 2.	Soliditas Pengurus Golkar Sumut dalam pemenangan Pilkada .....	25
Gambar 3.	Doli Kurnia Tanjung selaku Plt DPD Golkar Sumatera Utara .....	28
Gambar 4.	Rolel Harahap selaku Sekretaris DPD Golkar Sumut .....	29
Gambar 5.	Yasir Ridho Lubis Selaku Ketua Harian Golkar Sumut.....	31
Gambar 6.	De Eskalasi Konflik.....	59
Gambar 7.	Posisi Strategis Sumatera Utara dalam Peta Politik Nasional .....	61
Gambar 8.	Dari Rakerda ke Konsensus: MKGR Sumut Menyatukan Sikap di Balik Dukungan Hendriyanto Sitorus (Analisadaily.com) .....	75
Gambar 9.	Sangkot Sirait: Silaturahmi dengan Kader SOKSI di Sumatera Utara ...	78
Gambar 10.	Pelatihan Pengelolaan Media Sosial yang Dilakukan SOKSI .....	79
Gambar 11.	Ketua PDK Kosgoro 1957 Sumut Riza Fakhrumi Tahir, Pengurus dan Pimpinan Daerah Kolektif (PDK), berfoto bersama usai menggelar Donor Darah dan Bakti Sosial menyambut HUT ke 67 tahun .....	80
Gambar 12.	Penyerahan Sertifikat Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kader KOSGORO 1957 .....	82
Gambar 13.	Ketua DPD AMPI Sumut dr. David Luther Lubis .....	84
Gambar 14.	DPD AMPI Sumut & Medan Gelar Baksos dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kampung Nelayan .....	85
Gambar 15.	Program AMPG Rekrut 2 Juta Kader Untuk Kemenangan Partai Golkar .....	88
Gambar 16.	Penyerahan Bantuan Dampak Bencana oleh Ketua Umum AMPG Pusat .....	89
Gambar 17.	KPPG Siap Jadi Kekuatan Utama Pendorong Kemajuan Partai Golkar Yang Inklusif dan Responsif .....	90
Gambar 18.	Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Raih Penghargaan Kinerja Terbaik pada Momentum HUT Ke-61 Partai Golkar .....	91
Gambar 19.	Ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia(tengah) saat konferensi pers, Musda DPD I Partai Golkar Gorontalo .....	92
Gambar 20.	DPG Golkar Gorontalo juga memecahkan rekor MURI 700 ribu peserta ikuti senam Golkar se Indonesia .....	93
Gambar 21.	Ketua Umum Partai Golkar Periode 2019-2024 Airlangga Hartarto ....	94
Gambar 22.	Wakil Gubernur Sumut Surya Memukul Gong Pembukaan Bimbingan Teknik Anggota DRPD Fraksi Partai Golkar se-Sumut .....	95

Gambar 23. Daftar Anggota DPRD Provinsu Sumatera Utara dari Partai Golkar Periode 2024 – 2029 .....	101
Gambar 24. Daftar Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Golkar Periode 2024 – 2029 .....	102
Gambar 25. Daftar Gubernur Kader Golkar Sumut yang Menjadi GÜbernur Periode 2024-2029 .....	105
Gambar 26. Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu Utara, Hendriyato Sitorus .....	105
Gambar 27. Perebutan Suara Pemilih Pemula.....	130
Gambar 28. Upaya Parpol Menarik Suara Masyarakat .....	131

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam proses konsolidasi demokrasi. Peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Asrinaldi, 2014). Setiap Negara yang ingin dianggap demokratis maka antara lain akan membentuk parpol dan melaksanakan pemilu. Parpol adalah salah satu organisasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat karena rakyat tidak dapat memilih langsung para pemimpinnya. Ciri terpenting dari partai politik adalah bahwa proses pembentukannya ditentukan sepenuhnya oleh kerangka sosio-politik masyarakatnya (David Apter, 2005:193). Partai politik sebagai salah satu subjek dari pendidikan politik, hal ini terkait fungsi dari partai politik itu sendiri menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Siboy, 2022). Tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk mewujudkan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara dan tujuan nasional dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia (Subiyanto, 2020).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nuryadi & Widiatmaka, 2024). Sistem pemilu di Indonesia tahun 2024 adalah proporsional terbuka sehingga mendorong calon untuk bersaing untuk mendapatkan suara dari rakyat agar bisa memperoleh kursi di parlemen. Sistem proporsional terbuka memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dan dipilih, namun dampak negatifnya para pemilih (rakyat) dapat terbelah karena memiliki pilihan berbeda sehingga berpotensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat (Khairunnisa & Fatimah, 2023).

Partai politik menjadi instrumen demokrasi terpenting yang menentukan kualitas dari pemilu. Sejarah partai politik di Indonesia juga merupakan bukti dari aktualisasi masyarakat yang dilembagakan, di mana entitas dalam masyarakat bersatu dan membentuk partai politik. Secara konseptual, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Partai politik muncul dan berkembang dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah, mereka dapat menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran dan cita-cita yang sama sehingga orientasi mereka bisa bersama-sama dikonsolidasikan (Budiardjo, 2017). Peran serta atau partisipasi politik masyarakat merupakan andalan utama dari dinamika

perubahan dan kebebasan tersebut. Pembangunan nasional mengandalkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam perspektif politik, setidaknya menurut Huntington, partisipasi masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik. Di sini terlihat bahwa kemajuan demokrasi dapat dilihat sampai seberapa besar pemberdayaan sekaligus sikap responsive terhadap aspirasi politik masyarakat. Di sini pulalah terletak perbedaannya dengan masyarakat tradisional atau otoriter, mengalineanasi rakyat dari percaturan politik, sehingga hanya menjadi urusan segolongan elite semata (Indria Samego, 1998)

Hal-hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap keberadaan partai politik. Sehingga, tidak sedikit yang antipati terhadap parpol tertentu. Hal itu bisa dibuktikan pada raihan kursi yang diperoleh partai politik pada saat pemilihan umum. Malah ada partai politik yang tergradasi karena tidak memenuhi kuota sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Pandangan negatif publik terhadap partai politik sebagaimana dikemukakan di atas tidak bisa dipersalahkan. Namun demikian, apa pun alasannya kita tetap membutuhkan partai politik tersebut. Sebab, seperti dikemukakan sebelumnya bahwa partai politik itu merupakan sarana dan/atau pilar dalam mewujudkan demokrasi. Pengejawantahan hak politik dilakukan melalui partai politik. Hubungan dan keharmonisan antar individu, kelompok dan masyarakat harus dijaga dan dipelihara oleh setiap individu maupun kelompok. Dengan terpeliharanya hubungan sosial yang baik akan menghilangkan jurang dan kesenjangan sosial, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Hidup yang harmonis seperti, rukun, damai dan sejahtera di masyarakat menjadi keinginan semua orang saat ini. Namun keinginan baik itu tidak selalu berjalan mulus. Banyak ditemukan karena permasalahan kecil, tidak mau menerima penerimaan dan pemaksaan kehendak pribadi atau kelompok kepada orang lain telah memunculkan permusuhan dan kegaduhan di masyarakat. Sebagai bangsa dengan penduduk yang beragam, tentunya disaat melakukan interaksi bermasyarakat pasti akan menemukan banyak sekali perbedaan (Yulsi M. Nitte, 2024).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan harmonisasi sebagai upaya dalam rangka mencari keselarasan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih fleksibel (luwes) dan terbuka. Tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perbedaan. Sehingga diharapkan mampu menjadi bagian penting untuk menghasilkan komunikasi serta tindakan yang lebih baik dalam upaya menciptakan integritas bagi penyelenggara pemilu. Kesadaran akan pentingnya kesolidan tim kerja tersebut, juga menjadi salah satu sarana untuk membantu mengendalikan tiap perselisihan yang muncul. Sehingga, ketika potensi perselisihan mulai muncul, diharapkan tidak menjadi persoalan besar setelah masing-masing pihak terkait saling bisa memahami. Kesolidan tersebut diharapkan mampu menjadi sarana untuk menciptakan tim kerja yang diharapkan mampu menghasilkan pemilu berintegritas.

Berbicara Pemilu maka berkaitan dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Setiap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa, dengan pemilu, kepentingan mereka terakomodasi dalam lembaga politik yang ada atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Meski begitu, kegiatan pemberian suara dalam pemilu dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling

kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Melihat berbagai fenomena yang terjadi pada elite selama ini maka menurut Thompson (2002:139) bahwa pejabat-pejabat yang memerintah menghadapi konflik antara kewajiban dan kebaikan orang-orang tertentu dan kewajiban demi kebaikan publik, kadang-kadang peran mereka mengizinkan atau bahkan menuntut tindakan-tindakan yang mungkin salah jika dilakukan. Senada dengan apa yang dikatakan Thompson maka Chilcote (2004:371) berpendapat bahwa kondisi yang terjadi selama ini pada Elite dan masyarakat dapat dikatakan sebagai krisis partisipasi, yang artinya konflik yang terjadi ketika elite memerintah memandang permintaan-permintaan dan perilaku individu-individu yang mencoba berpartisipasi dalam sistem politik sebagai tidak terlegitimasi sehingga menimbulkan tekanan-tekanan kepada elite yang memerintah dan berakhir pada perubahan sikap dari Elite ataupun masyarakat tersebut.

Dunia politik saat ini, telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan, terlebih yang berkaitan dengan hubungan antara kontestan politik dan konstituen, khususnya ikatan antara partai politik dengan publik. Saat ini, publik memandang partai politik itu tidak terlalu terikat dengan ideologi yang dianut oleh suatu partai politik. Publik memandang partai politik itu lebih mengarah kepada apa yang menjadi konsep dan gagasan partai politik dalam membangun kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Memang tidak bisa dipungkiri, pandangan publik ke partai politik itu mengalami krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan itu terjadi akibat ulah sekelompok elit politik koruptif yang sering berlaku curang (Roby, 2018). Sikap koruptif elit politik itu telah menciderai kepercayaan publik kepada partai politik itu. Di samping perilaku koruptif, para elit politik juga sering mengubur janji dalam meraih suara pada waktu kampanye. Setelah terpilih, janji tersebut tidak pernah diwujudkan. Belakangan ini, elit politik malah membangun politik primordial dalam meraih kekuasaan, baik itu primordial berbasis agama maupun kesukuan (Pajaitan, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan soliditas partai politik. Penelitian yang dilakukan oleh (Al-Hamdi, 2022; Al-Hamdi et al., 2023; Anawati & Al Hamdi, 2020) menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki soliditas yang kokoh secara kelembagaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Djuyandi & Suparman, 2020; Noor, 2015) menjelaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki soliditas internal yang lemah. Kemudian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Golkar. Penelitian dari (Budiana, 2023; Priyanto et al., 2021; Priyowidodo et al., 2014; Purnama et al., 2014) membahas tentang strategi kampanye dan komunikasi politik Golkar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk strategi kampanye dan komunikasi politik Golkar adalah dengan menggunakan strategi pencitraan/figur, strategi basis massa, memasang calon unggulan dengan sesama kader Golkar yang populer, dan pendekatan komunitas.

Urgensi dari tulisan ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana kepemimpinan prosedural pengurus partai politik dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi agar tercapai harmonisasi dan soliditas pengurus diantara pengurus partai dan saat partai dihadapkan pada perbedaan dalam keputusan strategis. Pemilihan pengurus partai maupun dalam penetapan kepala daerah seringkali menjadi ajang yang memperkuat

ketegangan internal, terutama dalam hal pencalonan yang melibatkan kepentingan politik di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, analisis penerapan mekanisme organisasi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini sangat penting, terutama bagi partai besar seperti Golkar yang memiliki struktur hierarkis dan tradisi kepemimpinan yang kuat. Dalam artikel ini jenis penelitian menggunakan pendekatan metode studi kasus (*case studies*) kualitatif, ada beberapa definisi mengenai pendekatan studi kasus (*case studies*) menurut Suharsimi (2018:120) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Studi kasus yang dilakukan. Menurut Yin (2019:1) secara umum, studi kasus dapat diartikan sebagai metode atau strategi penelitian dan sekaligus hasil suatu penelitian pada kasus tertentu. Dalam *mainstream* ilmu-ilmu sosial yang kini berkembang periset umumnya lebih menekankan bahwa studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu "kasus" dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Creswell (2019:156,) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2021:137) Ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa dilakukan yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam penentuan informan menggunakan teknik penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan model *criterion based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Selain itu, dapat juga menggunakan *model snow ballsampling* dan *sampling purposive* untuk memperluas subjek penelitian karena penelitian kualitatif lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan.

Dalam hal ini informan-informan yang dirujuk antara lain adalah orang-orang yang dianggap representatif dan memahami masalah yang diangkat dalam studi. Informan dibagi ke dalam tiga aspek yakni pihak yang telah ada sejak awal Partai Golkar berdiri, diantaranya adalah Wagirin Arman, Rolel Harahap, Indra Alamsyah, Syaf Lubis, Isma Fadli, Pihak kedua yakni pihak yang baru bergabung dengan Partai Golkar yakni Musa Rahejeksah, dan terakhir, pihak ketiga yakni informan selaku akademisi yakni Prof. Badaruddin, M.Si yang berada di luar struktur kepengurusan Golkar dan selaku pengamat politik sebagai sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan penulis dalam memandang topik dalam buku ini tentang harmonisasi, soliditas dan kolaborasi dalam Sumut Berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, S., & Yuliasari, I. (2022). Komunikasi Politik Politisi Partai (Studi Kasus Presentasi Diri Politisi DPP Partai Golkar Pada Pemilu 2019). *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(4), 87–101.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 156.
- Abugaza, Anwar (2014). *Social Media Politica: Gerak Massa Tanpa Lembaga*. Jakarta: Tali Writing & Publishing Home.
- Alan Ware. 2005. *The Logic of Party Democracy*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Al-Hamdi, R. (2022). Nationalist-Islamist Party in a Liberal Ecosystem: The Solidity and Campaign Strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) during the 2014 and 2019 Elections. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 290–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.290-304>
- Al-Hamdi, R., Handayani, H. S., Fansuri, H., & Sofyan, N. (2023). The Solidity of Islamist Parties in Contemporary Southeast Asian Elections: A Comparative Analysis between the Malaysian Islamist Party (PAS) and the Prosperous Justice Party (PKS). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.43427>
- Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). Penelitian Kualitatif: Pegangan mahasiswa ilmu pemerintahan. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- American Heritage Dictionary. (2002). Kolaboratif Definition. 4th Edition 2002
- Amirullah, (2015). Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anang Anas Azhar. (2017). *KOMUNIKASI POLITIK UNTUK PENCITRAAN Konsep, Strategi dan Pencitraan Politik*. Cetakan pertama: Desember 2017. Medan: Perdana Publishing. ISBN 978-602-6462-97-8
- Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas partai dan stabilitas perolehan suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 105–125. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.4636>
- Anderson, E.T. & J. McFarlane. (2004). *Community as Partner Theory and Practice in Nursing* 4th Ed. Philadelphia.
- Andry. (2024). Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal. *JGPI: Journal of Governance and Policy Innovation*. E-ISSN: 2775-0140 Vol.4, No.2, Oktober 2024; pp. 62-68
- Ar, B. A., & Hasanuddin. (2021). Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Upaya Mendapatkan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Online*

- Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(1), 1–12.  
[https://jom.unri.ac.id/index.php/JO\\_MFSIP/article/view/29973](https://jom.unri.ac.id/index.php/JO_MFSIP/article/view/29973) As
- Arnold, Steinberg. (1981). *Kampanye Politik Dalam Praktek*. Jakarta: PT Intermedia,
- Asrinaldi. (2014). *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Astuti, N., Permana, T., & Hadi, F. (2023). Strategi adaptif organisasi dalam era ketidakpastian: Pendekatan kolaboratif dan inovatif. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 23(1), 45–57.
- Benoit, K. (2004). The Relationship Between Electoral Systems and Political Parties: Theoretical and Empirical Considerations. *Comparative Political Studies*, 37(3), 276–300.
- Birch, S. (2007). *Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Carson, L. (2010). *Electoral Systems and Democracy: A Comparative Analysis of New Democracies*. London: Routledge.
- Budiana, M. (2023). Indonesian Democratic Party Of Struggle (PDI Perjuangan) Strategy In 2019 West Java Province Legislative Election. *Humanities & Social*.
- Budiardjo. Miriam. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia. hlm. 163-164.
- Budiardjo Miriam. (2016). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burhan Bungin. (2006). *SOSIOLOGI KOMUNIKASI. Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup.
- Burhan Bungin. (2021). *SOSIOLOGI KOMUNIKASI. Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup
- Burns, James MacGregor, J.W. Petalson, and Thomas E. Cronin. 1989. *Government by the People*. New Jersey: Prentice Hall 1
- Cangara, Hafied. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Carol C. Gould. (1994). *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Carpenter, Mason. A. & Sanders, W.M, Gerard. (2009). *Strategic Management: A Dynamic Perspective*, 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Printice Hall)
- Chilcote Ronald,H. 2004. *Teori Perbandingan Politik*,”penelusuran paradigma. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications
- David Apter E. (2005). *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Dewangga & Solihah. (2023). Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka Menjelang Pemilu 2024. *Teropong Aspirasi Politik vIslam*, 19(1), 66–87.  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>

- Dimas Dwicahyo Wibisono. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 3 No 1 2023, hal 832-842 Available online at: <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen & Co.
- Djumara, *Noorsyamsa*. (2008). *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI
- Djuyandi, Yusa. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djuyandi, Yusa., & Suparman, S. M. (2020). Konflik Internal PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 176–190. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13694>
- Djuyandi Yusa, Ahmad Habibie Bungsu Maula Akbar. (2023). Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. *JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK VOLUME 7 NO 1 JUNI 2023*, pp. 1 – 10 ISSN 2580-8559 (p) / ISNN 2580-8450 (e) DOI : 10.23960/jasp.v7i1.106
- Edward M Marshall. (2005). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, AMACOM,
- Efriza. (2013). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabate.
- Ergu Ozbudun. 2007. "Institutionalizing Competitive Elections in Developing Societies", dalam Myron Weiner dan Ergun Ozbudun (editor), *Competitive Election in Developing Countries*, (Duke: Duke University Press.
- Evendy Sondakh. (2014). Analisis Sikap Elite Politik Lokal Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. [Vol 4, No 027 \(2014\)](#)
- Fadil, I. (2020). *Gotong Royong Kader PDIP Dinilai Modal Kuat Menangkan Paslon di Pilkada*. Merdeka.Com
- Fathoni Ahmad. (2022). mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama, <http://nu.or.id/opini/mewujudkan-harmonisasi-umat-beragama-7ucc> diakses tanggal 9 Juni 2022
- Faturochman, (2003). *Konflik: Ketidak-adilan dan Identitas*. Yogyakarta : PPSK UGM.
- Feriandy. (2023). Dinamika Kolaborasi Tim Dan Efisiensi Kerja: Kunci Keberhasilan Pencapaian Tujuan Organisasi. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*. [Vol. 3 No. 2 \(2022\)](#)
- Fisher, Simon dkk, (2012). *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*, Terj. British Council, Indonesia.
- Fitria, W., & Sari, L. (2021). Pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan: Peran mediasi kolaborasi tim. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 115–128.

- Gray, Barbara. (2007). *Collaborating: Finding Common Ground Formultiparty Problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Haryanto, T. (2023). Pengaruh Ambang Batas Minimal terhadap Kompetisi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 15(2), 123-140.
- Huntington, Samuel. 2003. *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*. Norman: University Of Oklahoma Press
- Ica Fitriani. (2025). Kepemimpinan Prosedural dalam Penguatan Soliditas Partai Golkar Kota Jambi pada Pilkada Serentak 2024. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 2 Nomor. 4 Desember 2025*. e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 10-22
- Indria Samego, (1998). *Demitologisasi Politik Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo
- Irfan, M. (2020). *Gotong Royong Jadi Strategi Jitu PDI Perjuangan di Pilkada Serentak 2020*, Hasto: Sari Pati Pancasila. *Pikiran-Rakyat.Com*.
- Iskandar, M., & Ramdani, A. (2022). Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi dalam peningkatan efektivitas organisasi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 10(1), 22–35
- Kamarudin*. (2013). *Konflik Internal Partai Politik: Studi Kasus Partai Kebangkitan. Bangsa*. *Jurnal Penelitian Politik*. 10(1): Hlm. 29-39.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. *Party Politics*, 1(1), 5-28.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Desember. 2025. <https://kbbi.web.id/harmonisasi>
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.311>.
- Kusnu Goesniadhie. (2016). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books
- Lapalombara, Joseph and Myron Weiner (1957) eds.. *Political Parties and Political Development*. New York: Princeton University Press,
- Lestari, D., & Dewi, M. (2022). Integrasi nilai ESG dalam strategi bisnis berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(3), 78–91.
- Lilis Handayani. (2025). Kolaborasi Tim dan Efektivitas Kinerja Organisasi. *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW*. eISSN 3090-6954 & pISSN 3090-9392. Vol. 1, No. 2, Tahun 2025. [doi.org/10.63822/xnnjpp04](https://doi.org/10.63822/xnnjpp04). Hal. 282-291
- Lindeke, L., Sieckert, A. M, (2019). Nurse-Physician Workplace Collaboration, *OnlineJournal of Issues in Nursing*.
- M Hazatul Ansar. 2021. Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Mengusung Calon Legislatif Dprd Kota Kendari Pada Dapil IV Kambu-Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *KABANTI: Jurnal Sosial dan Budaya*. ISSN: 2622-8750 (Cetak) Volume 5, Nomor 2 Desember 2021: 112-126. ISSN: 2503-3468 ([Onlinekabanti.antropologi@uho.ac.id](mailto:Onlinekabanti.antropologi@uho.ac.id))

- Mahendra A.A, Oka. (2015). PILKADA ditengah konflik horizontal. Jakarta: Gramedia
- Michael Rush dan Philip Althoff. (2013). Pengantar Sosiologi Politik. Cetakan ke-15. Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka
- Noor, Firman. (2015). Perpecahan dan Soliditas Partai Islam: Kasus PKB dan PKS di Dekade Pertama Reformasi. Jakarta: LIPI Press
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2024). Democracy Education As A Vehicle to Anticipate the Development of SARA Politics in Elections. *Jurnal Paedagogy*, 11(1), 61–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jp.v11i1.9805>
- Pamungkas, S. (2011). PARTAI POLITIK. Teori dan Praktik di Indonesia. Penerbit, Institute for Democracy and Welfarism, ISBN, 602963822X.
- Panjaitan Marojahan J.S. (2019). Fungsi Dan Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Law*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Powell, G. B. (2000). Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions. New Haven: Yale University Press.
- Priyanto, A., Pribadi, U., & Rahmanto, F. (2021). The effect of political party communication through social media on the results of the 2019 legislative general election (nasdem party, pks, and pdip twitter case study). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 12022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012022>
- Priowidodo, G., Swestin, G., & NurVidyarini, T. (2014). The faces of conflict in a political organization: the case of the Indonesia Democracy Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19), 608–618. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n19p608>
- Purnama, A. A. D., Utomo, S., & Martini, R. (2014). Strategi Politik PDIP Dalam Pemenangan Pasangan Ganjar–Heru Di Pilgub Jawa Tengah Tahun 2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), 266–275. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5093>
- Randall, Vicky dan Lars Svasand. (2002). “Party Institutionalizations in New Democracies” dalam *Sage Publications Vol 8 No 1* (hlm. 5-29).
- Rauf, Maswardi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*, Jakarta: DIKTI.
- Robbins, P. S dan Judge, T. A. 2017. *Organizational Behaviour*. Edisi 13, Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat
- Roby Arya Brata. (2018). Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Analisis Masalah Antikorupsi, dan Kebijakan Kontemporer. Jakarta: Pustaka Mania. hlm. 10.
- Roucek & Warren. (2009). Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai PostModernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, A. (2022a). Partai Buruh di MK: Verifikasi Faktual Parpol Tak Sesuai Kedaulatan Rakyat. <https://news.detik.com/berita/d-6262008/partai-buruh-dimk-verifikasi-faktual-parpol-tak-sesuai-kedaulatan-rakyat>.

- Sari, L., & Ramadhan, I. (2022). Loyalitas kader sebagai pilar soliditas partai politik. *Jurnal Sosial Politik*, 13(2), 98–112.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is... and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88. Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press. Smith, J., & Müller, K. (2022). Inclusive Electoral Systems and Political Stability: Lessons from Europe. *Journal of Comparative Politics*, 10(1), 45-60.
- Schröder, P. (2010). *Strategi Politik* (3rd ed.). Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia
- Setiadi dan Sukamdi. 2011. *Migrasi Internasional: Strategi Kelangsungan Hidup pada Era Krisis Ekonomi* [Versi lengkap paper ini akan terbit dalam *Jurnal Populasi* Bulan Desember 2002 dengan judul “Is International Migration A Way Out Of Economic Crisis?”
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>.
- Siboy, A. (2022). Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Arena Hukum*, 15(1), 200–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10>
- Sitepu P. Anthonius. (2012). *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graham Ilmu. hal 82
- Sopiah, & Sangadji, E. M. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. (D. Prabantini, Ed.) (Ed.1). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Subekti, D., & Al-Hamdi, R. (2024). Soliditas internal partai berkuasa di Indonesia dalam mengukung anak presiden di Pemilihan Walikota Surakarta 2020. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 121–138. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22234>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuddin Haris. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta. hlm. 19.
- Thoha, Miftah (2015). Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Thompson, Dennis F. (2002). *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahyudi, Alwi. (2014). *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan. Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*. Cetakan ke-1 Jakarta: Kencana

Wijaya, R., Santoso, H., & Pratama, A. (2021). Dimensi kinerja organisasi: Perspektif sumber daya manusia dan kolaborasi tim. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 17(4), 132–146. dinamika dan perspektif yang lebih kaya untuk inovasi.

Yin K. Robert. (2019). *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta : Rajawali Press

Yulsi M. Nitte. (2024). Harmonisasi Kehidupan Berlandaskan Sila Persatuan Indonesia di SDN Pasir Panjang, Kupang. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume. 1, No. 4, November 2024. e-ISSN : 3047-051X, dan p-ISSN : 3047-048X, Hal.144-149.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengasahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,

## **WEBSITE**

<https://medan.tribunnews.id>, 2025)

<https://sumut.kpu.go.id/blog/read/daftar-pemilih-di-sumut-bertambah-30451>

<https://sumut.antaranews.com/berita/565857/kpu-sumut-jumlah-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-capai-7508-persen>

Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai politik paling kaya akan pengalaman dalam kancah perpolitikan nasional yang masih eksis hingga hari ini.

<https://kabargolkar.com>: Lewat Pendidikan Politik Golkar Institute, Theo Sambuaga Paparkan Sejarah, Transformasi, dan Kekuatan Golkar - Kabar Golkar. [https://kabargolkar.com/read/kabar\\_nasional/37195/lewat-pendidikan-politik-golkar-institute-theo-sambuaga-paparkan-sejarah-transformasi-dan-kekuatan-golkar?fbclid=IwdGRzaAPRwq5jbGNrA9HCk2V4dG4DYWVtAjExAHNydgMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHjPcvXLvoF6A8ABmWc\\_pvMf40LbSWuRApsBoEjVqWm4rxH-h0KzXDk1L6iEP\\_aem\\_ulyRSuqXx4-K9a41JBCTVA&sfnsn=wiwspwa](https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/37195/lewat-pendidikan-politik-golkar-institute-theo-sambuaga-paparkan-sejarah-transformasi-dan-kekuatan-golkar?fbclid=IwdGRzaAPRwq5jbGNrA9HCk2V4dG4DYWVtAjExAHNydgMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHjPcvXLvoF6A8ABmWc_pvMf40LbSWuRApsBoEjVqWm4rxH-h0KzXDk1L6iEP_aem_ulyRSuqXx4-K9a41JBCTVA&sfnsn=wiwspwa)

wawancara dengan Wagirin Arman, selaku kader Golkar, mantan Ketua Golkar Sumut dan mantan Anggota DPRD Sumut Periode 2019-2024, tanggal 13 Januari 2026.

wawancara dengan Indra Alamsyah, SH, selaku kader Golkar, mantan Ketua Depidar II Soksi Sumut dan mantan Anggota DPRD Sumut Periode 2019-2024, tanggal 13 Januari 2026.

wawancara dengan Syaf Lubis, selaku kader Golkar, mantan Ketua Golkar Sumut dan mantan Anggota DPRD Sumut Periode 2019-2024, tanggal 13 Januari 2026.

## **BIODATA PENULIS**

Suheri Harahap adalah seorang akademisi dan tokoh masyarakat yang lahir pada 13 Oktober 1972 di Hutalambung, Desa Parsalakan, Tapanuli Selatan. Ia meraih gelar Doktor di S3 Program Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU).

### **Profil Akademik:**

- Dosen tetap di Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara

### **Pengalaman Organisasi:**

- Ketua Umum DPD IMM Sumut Tahun 1998-2000
- Sekretaris DPD KNPI Sumut Tahun 2005-2008
- Wakil Ketua DPD AMPI Sumut Tahun 2010-2015
- Wakil Ketua Depidar II SOKSI Sumut 2015-2020
- Visiting Lecture di UIN Yogyakarta (2024)

Medan, Januari 2026



*Dinamika*  
**PARTAI  
GOLKAR**  
**SUMATERA UTARA**

*Tantangan dan Masa Depan*

Di tengah arus desentralisasi demokrasi Indonesia, partai politik di tingkat daerah menghadapi tantangan struktural dan kultural yang semakin kompleks. Sumatera Utara, dengan karakteristik politiknya yang dinamis, menjadi panggung krusial bagi Partai Golkar untuk membuktikan ketahanan organisasinya. Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik yang mendalam untuk membedah bagaimana sebuah kekuatan politik besar merespons perubahan preferensi pemilih, kemajuan teknologi, serta tuntutan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan di ruang politik lokal.

Buku ini mengeksplorasi mekanisme internal Golkar dalam mengelola harmoni dan konflik antar-elite yang sering kali menjadi riak dalam organisasi. Melalui sepuluh bab komprehensif, pembaca diajak menelusuri strategi solidaritas, kolaborasi program kerja, hingga taktik kemenangan elektoral berdasarkan data faktual KPU. Tidak hanya terpaku pada masa lalu, buku ini secara tajam memproyeksikan tantangan Pemilu 2029, termasuk dampak penghapusan ambang batas minimal terhadap strategi koalisi serta sirkulasi elite dalam filosofi kekayaan di bawah naungan pohon beringin.

Ditulis dengan pendekatan analitis dan terbuka, karya ini unggul karena memadukan perspektif psikologi politik, manajemen pengetahuan, dan digitalisasi sosiologis. Buku ini merupakan referensi esensial bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi politik yang ingin memahami kompleksitas dinamika partai sebagai institusi demokrasi, bukan sekadar kendaraan kekuasaan. Sebuah refleksi kritis bagi siapa pun yang peduli terhadap masa depan demokrasi dan penguatan kelembagaan politik di Indonesia.



Penerbit  
**LITERA**  
[Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP]  
Email: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
<http://www.prenadamedia.com>

